

Analisis Pengeluaran Pemerintah Di Sektor Kesehatan, Pendidikan, Dan Infrastruktur Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Indonesia

Agustri Yogi Hidayat¹, Zul Azhar²

^aJurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang

*Korespondensi: Yogihidayat133@gmail.com

Info Artikel

Diterima:

20 Januari 2022

Disetujui:

28 Februari 2022

Terbit daring:

01 Maret 2022

Sitasi:

Hidayatm A,Y, & Azhar, Z, (2022). Analisis Pengeluaran Pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia.

JKEP: Jurnal kajian ekonomi dan pembangunan, 4(1),

Abstract

This study aims to determine: (1) the effect of government spending on the health sector on poverty in Indonesia, (2) the effect of government spending on the education sector on poverty in Indonesia, (3) the effect of government spending on the infrastructure sector on poverty in Indonesia. The type of research used is descriptive and associative. The data used in this study are secondary data from 2017 to 2019 in Indonesia using panel data with the random effect model approach. By doing analisis regression with random effect model, hypothesis test, and classical assumption test. The results of this study indicate that government spending in the health sector has a negative and insignificant effect on poverty in Indonesia with a probability of 0.9476. Index. Government spending in the education sector has a significant negative effect on poverty in Indonesia with a probability of 0.0030. Government spending in the infrastructure sector has a positive and insignificant effect on poverty in Indonesia with a probability of 0.5756 index.

Keywords: Health, Education, Infrastructure, Poverty

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui : (1) pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia, (2) pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan terhadap kemiskinan di Indonesia, (3) pengaruh pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia. Jenis Penelitian yang digunakan adalah deskriptif dan asosiatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dari tahun 2017 sampai dengan 2019 di Indonesia dengan menggunakan data panel dengan model random efek.. Dengan melakukan analisis regresi data panel dengan random effect model, uji hipotesa dan asumsi klasik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah di sector kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas sebesar 0,9476. Pengeluaran pemerintah di sector pendidikan berpengaruh negative signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas sebesar 0,0030. Indeks. Pengeluaran pemerintah di sector infrastruktur berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dengan probabilitas sebesar 0,5756. Indeks.

Kata Kunci : Kesehatan, Pendidikan, Infrastruktur, Kemiskinan

Kode Klasifikasi JEL: H51, H52, H53

PENDAHULUAN

Kesejahteraan rakyat merupakan salah satu point penting yang harus diperhatikan pemerintah, guna meningkatkan kesejahteraan rakyat pemerintah pusat hingga daerah berupaya untuk meningkatkan perekonomian melalui kinerjanya, yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga tatanan masyarakat dapat dibentuk dan terbentuk dengan baik

dengan harapan masyarakat dapat memiliki kehidupan yang layak dan sejahtera. Salah satu misinya tentu menurunkan angka kemiskinan yang akan menimbulkan dampak negatif terhadap pembangunan ekonomi. Di lain sisi, angka kemiskinan di suatu wilayah atau negara dari sudut pandang ekonomi merupakan salah satu skala ukur atau indikator untuk mengetahui derajat kesejahteraan masyarakat suatu negara.

Kemiskinan merupakan suatu keadaan dimana tidak mempunya memenuhi kebutuhan pokok atau standar hidup yang rendah, hal tersebut berhubungan dengan penghasilan yang kecil, tempat tinggal yang kurang atau tidak layak, kondisi kesehatan yang buruk, pelayanan kesehatan yang tidak baik, rendahnya tingkat pendidikan yang berdampak dengan kualitas sumber daya manusia, serta tingginya angka pengangguran, (Kuncoro, 2007).

Landasan yang mengarah atau mengacu terhadap garis kemiskinan disebut kemiskinan *absolut*, dimana kondisi kemiskinan berada pada tingkat bawah, keadaan yang tidak mampu memenuhi kebutuhan-kebutuhan kecil atau minimum untuk bertahan hidup. Selain itu ada juga kemiskinan *relative*, dimana konsep pengukurannya tidak berdasarkan garis kemiskinan. melainkan berupa ukuran untuk melihat perbedaan distribusi pendapatan, dapat di artikan dengan kaitannya tingkat rata-rata dari distribusi yang di maksud, (Kuncoro, 2007).

Kemiskinan merupakan fenomena sosial yang sering terjadi pada negara-negara dunia ketiga. Kemiskinan ditandai dengan keterbelakangan dan ketertinggalan, rendahnya produktivitas dan rendahnya pendapatan yang diterima, keterbatasan akses dan kemampuan serta kesempatan untuk mengembangkan diri dan meningkatkan kesejahteraan, (Putri et al., 2019).

Dari uraian latar belakang di atas dapat dilihat beberapa perbedaan dan perbedaan konsep kemiskinan secara teori. Menurut (Widodo et al., 2011) secara pengalaman/empiris bahwa pengalokasian pengeluaran pemerintah untuk publik secara langsung tidak berpengaruh terhadap indek pembangunan manusia (IPM) atau kemiskinan, tetapi secara bersama-sama (simultan), dengan pengeluaran public serta IPM. Hal tersebut menunjukkan bahwa biaya yang dikeluarkan pemerintah di bidang pendidikan, kesehatan tidak berpengaruh terhadap angka kemiskinan, tetapi harus bergabung dengan faktor atau sektor lainnya, seperti infrastruktur negara.

Di sisi lain biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk bidang pendidikan, kesehatan serta pembangunan infrastruktur terhadap kemiskinan baik secara nasional maupun provinsi terus meningkat setiap tahun. Namun secara pasti apakah pengeluaran pemerintah yang dikeluarkan tersebut dapat menurunkan jumlah penduduk miskin secara signifikan belum diketahui. Karena peranan pemerintah terhadap kemiskinan mempunyai efek yang sangat besar. Salah satu acuan kebijakan fiskal pemerintah dalam mengelola perekonomian adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah yang dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Struktur APBN telah banyak melalui perubahan seiring dengan perkembangannya. APBN yang digunakan saat ini yaitu anggaran berbasis kinerja sesuai dengan UU No.1 tahun 2004. Semenjak tahun 1969 diterapkannya sistim berimbang dan dinamik untuk penyusunan APBN.

Permasalahan kemiskinan di Indonesia adalah berkaitan dengan naiknya alokasi pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan, pendidikan serta infrastruktur yang meningkat setiap tahunnya apakah bisa memberikan efek yang besar terhadap penurunan persentase penduduk miskin atau bahkan sebaliknya. Sharp, et al (1996) dalam (Kuncoro, 2007) mencoba mengidentifikasi kemiskinan menjadi dua, secara mikro kemiskinan timbul disebabkan adanya ketimpangan dalam masalah distribusi pendapatan hal itu dapat terjadi karena perbedaan kepemilikan sumber daya yang dimiliki. Masyarakat miskin memiliki keterbatasan atas jumlah sumber dayanya serta kualitas yang rendah atau tidak cukup baik. Dua, munculnya kemiskinan karena kualitas dari sumber daya setiap manusia itu berbeda-beda. Jika SDM rendah, maka produktivitasnya juga rendah yang menyebabkan pendapatan akhirnya rendah. Kualitas SDM yang rendah dipengaruhi oleh beberapa factor di antaranya

keturunan, adanya diskriminasi, nasib kurang beruntung serta tingkatan pendidikan yang rendah. Ketiga, munculnya kemiskinan dapat terjadi karena cara mengakses modal dengan jalan yang berbeda. Ketiga aspek yang menimbulkan ketidakmampuan tersebut bermula pada teori yang disebut *vicious-circle of-poverty*.

Kajian/teori tersebut dikemukakan oleh Ragnar Nurkse (1953) didalam (Kuncoro, 2007), dimana ia menyatakan : *"a poor country is poor because it is poor"* (Negara miskin itu miskin karena dia miskin). Produktivitas yang rendah disebabkan oleh keterbelakangan, ketidak sempurnaan pasar, serta modal yang terbatas atau kurang. Oleh karena produktivitas rendah maka upah yang diterima juga rendah. Pendapatan yang rendah akan membatasi jumlah besaran tabungan dan investasi. Investasi yang rendah dapat menimbulkan keterbelakangan. Oleh sebab itu setiap kegiatan dengan tujuan menurunkan angka kemiskinan semestinya memotong lingkaran atau penyebab kemiskinan tersebut. (Kuncoro, 2007).

Dilihat dari unsur yang mempengaruhinya, kemiskinan bisa dibedakan atas kemiskinan structural dan kultural. Kemiskinan kultural yaitu suatu keadaan yang mengacu kepada sikap seseorang atau masyarakat karna *life style, habits* serta kebudayaannya. Kemiskinan *cultural* dapat dilihat dari tindakan seseorang atau sekelompok masyarakat yang menganggap keadaannya tidaklah miskin, padahal apabila di ukur berdasar garis kemiskinan mereka adalah kelompok dengan kategori miskin. Sementara itu kemiskinan structural ialah suatu kondisi kemiskinan karena struktur dari masyarakat itu timpang, dapat terjadi karena berbedanya kepemilikan, sumberdaya, penghasilan, dan kesempatan kerja yang tidak merata atau karena penyebaran pembangunan dan outputnya tidak rata. Kemiskinan structural dapat dilihat dari susunan masyarakat yang tidak seimbang terutama jika ditinjau dari ukuran ekonomi. (Suryawati, 2005).

Dalam skala kecil (mikro) biaya yang dikeluarkan pemerintah ialah dengan harapan dapat mengadakan kebutuhan atau barang untuk orang banyak yang tidak dikeluarkan oleh kelompok swasta, dan akibat dampak dari kegagalan pasar. Menurut (Mangkoesobroto, 2001), dari sisi mikro ekonomi teori pengembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisa sebab-sebab yang memicu permintaan suatu barang publik dan hal-hal yang mempengaruhi ketersediaan barang publik. Hubungan antara permintaan dan penawaran barang public menjadi cerminan mengenai jumlah kebutuhan public yang akan di masukkan ke dalam catatan anggaran belanja. Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk kebutuhan publik dapat menstimulus pengeluaran barang lainnya. Tingkatan pengeluaran pemerintah di pengaruh oleh berbagai unsur sebagai berikut :

1. Perubahan dicari untuk barang dagangan publik
2. Perubahan pada pelaksanaan pemerintahan dalam memberikan barang-barang publik, dan selanjutnya perubahan dalam campuran faktor-faktor penciptaan yang digunakan dalam siklus penciptaan.
3. Perubahan sifat produk publik
4. Perubahan biaya komponen pembuatan

Ditinjau dari sisi makro ekonomi biaya yang dikeluarkan pemerintah berguna menganalisa ukuran pemerintahan yang nantinya dapat menampilkan transaksi setiap anggaran, kebijakan umum, dan perusahaan umum. Pengeluaran pemerintah yang diperuntukkan untuk keperluan masyarakat luas bersifat fleksibel terhadap pertumbuhan ekonomi. Teori makro tentang perkembangan pemerintah dibedakan atas tiga kelompok atau golongan (Mangkoesobroto, 2001), yaitu:

Model pembangunan mengenai perkembangan biaya keluar pemerintah

Model yang di kemukakan oleh Rostow dan Musgrave, dimana model ini mengaitkan perkembangan pengeluaran pemerintah terhadap fase-fase pembangunan ekonomi. Tahap pertama dari pengembangan keuangan, dimana total investasi pemerintah haruslah besar karena pada fase ini pemerintah mesti mempersiapkan sarana dan prasarana antara lain untuk

pendidikan, transportasi, kesehatan, dan lainnya. Lanjut ke tahap medium pembangunan ekonomi, dimana pemerintah tidak berperan terlalu besar karena investasi dari swasta besar. Walaupun investasi dari pihak swasta sudah semakin besar, peran pemerintah lebih dibutuhkan karena menyebabkan kegagalan pasar akibat banyaknya peran swasta, pemerintah harus mampu mengadakan barang untuk public dengan kuantitas dan kualitas yang lebih baik. Untuk tahap ekonomi yang lebih lanjut, aksi pemerintah dalam meningkatkan ekonomi tertuju ke pengeluaran untuk kegiatan social, seperti program pelayanan kesehatan, serta program kesejahteraan di hari tua, dan lainnya.

1. Hukum Wagner

Hukum Wagner menyatakan bahwa jika gaji per kapita meningkat, pengeluaran pemerintah relatif akan meningkat. Ekspansi belanja pemerintah akan mendorong kekecewaan pasar dan eksternalitas. Hukum wagner memiliki kelemahan dimana hukumnya tidak berlandaskan dengan suatu kajian tentang pemilihan barang-barang public. Wagner menyatukan perspektifnya sehubungan dengan dugaan hipotesis dimana negara yang menganggap otoritas publik sebagai orang yang bebas untuk bertindak, diluar dari warga negara lainnya

2. Teori Peacock dan Wiseman

Peacock dan Wiseman mengajukan asumsi lain mengenai mengklarifikasi perbuatan formatif pengeluaran pemerintah. Otoritas publik semakin meningkatkan pajak untuk mendukung rencana pengeluarannya. Di lain sisi, warga negara malas membayarkan pajak, terutama jika pemabayaran pajak terus ditambah atau naik. Pertimbangkan untuk mengumpulkan biaya, dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak. Dalam keadaan ini, memicu munculnya suatu keadaan yang disebut dengan efek pengalihan (*displacement effect*), dimana keadaan yang menimbulkan ketidak tenangan social sehingga membuat kegiatan swasta dialihkan kepada aktivitas/kegiatan pemerintah.

Biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk bidang kesehatan merupakan bagian yang dibutuhkan pada indek kemiskinan. Kebijakan pemerintah menjamin hak warga negara untuk tetap sehat dengan cara memfasilitasi layanan kesehatan yang lengkap dan terjamin mutunya dengan biaya yang relatif murah agar bisa terjangkau oleh seluruh masyarakat bahkan dari kalangan yang rendah.

Keterkaitan kemiskinan dengan pendidikan sangat besar karena pendidikan memberikan kemampuan untuk berkembang lewat penguasaan ilmu dan keterampilan. Pendidikan juga menanamkan kesadaran akan pentingnya martabat manusia, mendidik dan memberi penguasaan berarti menggapai masa depan, dan seharusnya pemerintah berada di garda terdepan untuk mewujudkannya. Pendidikan perlu mendapatkan prioritas utama dalam mengatasi kebodohan, keterbelakangan, dan ketertinggalan sosial ekonominya. Lemahnya produktivitas kelompok miskin disebabkan karena kurangnya akses mendapatkan pendidikan. (Rasidin & Bonar, 2004)

Infrastruktur adalah pendorong utama perekonomian. Sarana transportasi mampu memfasilitasi orang, barang, serta jasa yang dibawa dari satu tempat ke tempat lainnya bahkan ke luar negeri sekalipun. Infrastruktur berperan penting guna memudahkan proses produksi, maupun meningkatkan distribusi komoditas ekonomi. Pernyataan tersebut di dukung oleh pendapat Ikhsan dalam (Wahyuni, 2009) yang menyatakan bahwa dari sisi langsung pembangunan infrastruktur itu sendiri adalah aktivitas produksi untuk menciptakan, menghasilkan kesempatan untuk kerja. Secara tidak langsung, dengan adanya infrastruktur yang dapat memengaruhi perkembangan bidang-bidnag ekonomi lainnya, teutama pada infrastructur dasar yang menghasilkan produktivitas yang lebih tinggi daripada infrastructur selainnya. Yang pada akhirnya perbaikan infrastruktur dapat mampu meningkatkan keadaan pembangunan, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menekan angka kemiskinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengkaji pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur terhadap kemiskinan di Indonesia. Metode penelitian ini yaitu asosiatif dengan pendekatan kuantitatif menggunakan data sekunder yang diperoleh dari lembaga instansi pemerintah yaitu Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia dan kementerian keuangan RI yang diakses melalui *website* situs internet. Variabel yang menjadi objek pada penelitian ini yaitu pengeluaran pemerintah bidang kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur dengan variabel terikatnya angka kemiskinan di Indonesia. Jenis data yang digunakan *time series pool*, yaitu perpaduan informasi *time series* dengan beberapa lokasi (*crossing*) dimana informasi dalam investigasi ini dikumpulkan dari tahun 2017 hingga 2019. Berdasarkan sifatnya data yang dipakai adalah data kuantitatif yaitu metode riset yang berfokus pada penggunaan angka, tabel dan grafik yang menunjukkan laju angka kemiskinan di Indonesia. Model analisis yang digunakan adalah analisis data panel yaitu *Random Effect Model* (REM). Pengolahan data menggunakan software Eviews 9 dan Microsoft Excel. Model yang digunakan pada analisis penelitian ini yaitu :

$$Y = \alpha_0 + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + U_{it} \quad (1)$$

Dimana Y adalah kemiskinan, α adalah konstanta/Koefisien, X_1 adalah pengeluaran Sektor Kesehatan, X_2 adalah Pengeluaran Sektor Pendidikan, X_3 adalah Pengeluaran Sektor Infrastruktur, U_{it} adalah Variabel Pengganggu

Kemiskinan (Y) adalah persentase penduduk yang berada pada garis kemiskinan di Indonesia tahun 2017-2019. Data diambil dari Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia. Pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_1) merupakan sejumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk fungsi kesehatan tahun 2017-2019 (dalam satuan triliun rupiah). Data diperoleh dari website Kementerian Pertanian. Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_2) merupakan sejumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk fungsi pendidikan tahun 2017-2019 (dalam satuan miliar triliun rupiah). Data diperoleh dari website Kementerian Keuangan. Pengeluaran pemerintah sektor Infrastruktur (X_3) merupakan sejumlah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah Indonesia untuk fungsi infrastruktur tahun 2017-2019 (dalam satuan miliar triliun rupiah). Data diperoleh dari website Kementerian Keuangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data runtun waktu (*time series*) dan runtun tempat (*cross section*). Berdasarkan hasil penelitian ini dapat dilihat besarnya tingkat pengaruh Kesehatan (X_1), Pendidikan (X_2), dan Infrastruktur (X_3) terhadap Kemiskinan (Y) pada hasil estimasi *Random Effect Model* (FEM), sehingga diperoleh hasil sebagai berikut :

$$Y = 3,230380 + (-0,000332) X_1 + (-0,036914) X_2 + (0,002547) X_3 \quad (2)$$

Berdasarkan hasil penelitian persamaan menunjukkan kesehatan (X_1) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia dimana nilai koefisien sebesar -0,000332. Hal tersebut menunjukkan bahwa apabila Kesehatan meningkat satu persen, maka Kemiskinan akan menurun sebesar 0,000332 satuan dan begitu sebaliknya. Pada *regression model* dapat dilihat bahwa Pendidikan (X_2) menunjukkan pengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia dengan nilai koefisien -0,036914 satuan. Hal tersebut menunjukkan apabila Pendidikan naik satu persen, maka Kemiskinan juga menurun sebesar -0,036914 satuan dan begitu sebaliknya.

Selanjutnya pada model Infrastruktur berpengaruh positif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia dengan koefisien regresi sebesar 0,002547. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

Infrastruktur meningkat satu persen akan membuat Kemiskinan juga meningkat sebesar 0,002547 satuan dan begitu sebaliknya.

Tabel 1. Hasil Estimasi Random Effect

Dependent Variable: Y
 Method: Panel EGLS (Cross-section random effects)
 Date: 01/13/21 Time: 22:45
 Sample: 2017 2019
 Periods included: 3
 Cross-sections included: 33
 Total panel (balanced) observations: 99
 Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.230380	0.365180	8.845996	0.0000
X1	-0.000332	0.005033	-0.065937	0.9476
X2	-0.036914	0.012137	-3.041551	0.0030
X3	0.002547	0.004534	0.561823	0.5756

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		0.504200	0.9962
Idiosyncratic random		0.031221	0.0038

Weighted Statistics			
R-squared	0.099222	Mean dependent var	0.080950
Adjusted R-squared	0.070776	S.D. dependent var	0.032277
S.E. of regression	0.031114	Sum squared resid	0.091965
F-statistic	3.488133	Durbin-Watson stat	1.300020
Prob(F-statistic)	0.018748		

Unweighted Statistics			
R-squared	-0.007957	Mean dependent var	2.265758
Sum squared resid	23.99524	Durbin-Watson stat	0.004983

Sumber : Eviews 9, Data di olah tahun 2020

Berdasarkan hasil pengujian yang telah diselesaikan diperoleh nilai R-square sebesar 0,099222. Hal ini berarti bahwa sebesar 9 % Kemiskinan dapat dijelaskan variabel bebas nya yaitu Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur, sedangkan sisanya 91 % dijelaskan oleh variabel lain selain variabel yang tidak dimasukkan penelitian ini.

Untuk mencari tahu nilai t-tabel, maka dicari $\alpha = 0,05$ dengan (df) $n - k$, dimana n merupakan banyak data dan k yaitu banyaknya variabel bebas atau $99 - 3 = 96$. Dengan pengujian signifikan 0,05 maka didapatkan nilai t-tabel sebesar 1.66088. Berdasarkan hasil uji hipotesis pertama dengan memakai variabel kesehatan didapatkan nilai t- statistik sebesar -0.065937 yang artinya $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak ($0.065937 < 1.66088$) dengan $\alpha = 0,05$. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Pada hasil uji hipotesa kedua dengan memakai variabel Pendidikan di peroleh angka t- statistik sebesar -3.041551 yang artinya $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$, maka tabel H_0 ditolak dan H_a diterima ($-3.041551 < 1.66088$) dengan $\alpha = 0,05$. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia.

Hasil selanjutnya uji hipotesis ketiga dengan memakai variabel Infrastruktur didapatkan nilai t-statistik sebesar 0.561823 yang berarti jika $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$, maka H_0 diterima dan H_a ditolak ($0.561823 < 1.66088$) berarti tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pengeluaran pemerintah sector infratstruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia.

Uji ini digunakan untuk melihat secara empiris pengaruh Kesehatan, Pendidikan dan Infrastruktur di Indonesia. Nilai probabilitas F statistic adalah 0.018748, nilai ini lebih kecil dari tingkat kesalahan 0,05 yang berarti variabel bebas yaitu Kesehatan, Pendidikan, dan Infrastruktur berpengaruh secara signifikan terhadap variabel terikat yaitu Kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian persamaan regresi panel menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_1) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia. Hasil penelitian persamaan regresi panel antara variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (X_1) terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia menunjukkan koefisien sebesar -0,000332, artinya apabila pengeluaran pemerintah sektor kesehatan meningkat satu persen, maka kemiskinan akan menurun sebesar 0,000332 satuan dan begitu sebaliknya. Dengan hasil analisis uji-t menunjukkan hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan variable pengeluaran pemerintah sektor kesehatan diperoleh $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ ($0.065937 < 1.66088$) dengan $\alpha = 0,05$ maka H_0 diterima dan H_a ditolak. Artinya tidak ada pengaruh yang signifikan antara kesehatan terhadap kemiskinan di Indonesia.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sector kesehatan berpengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya ketika pengeluaran pemerintah sector kesehatan meningkat maka Jumlah kemiskinan di Indonesia akan menurun, begitu sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah sector kesehatan Menurun, maka Kemiskinan akan meningkat. Pengeluaran pemerintah di sector kesehatan tidak selalu signifikan atau dapat mengurangi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor yang membuat anggaran yang telah di alokasikan pemerintah untuk sector kesehatan tidak tepat sasaran. Alokasi anggaran yang dikeluarkan pemerintah semata-mata tidak dapat diterima langsung oleh masyarakat yang membutuhkan.

Hasil penelitian (Mardiana et al., 2018) menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah daerah bidang kesehatan memiliki pengaruh negative dan signifikan terhadap kemiskinan. Dalam artian, Upaya pemerintah daerah dalam menetapkan dan menerapkan kebijakan dalam mengelola pembelanjaan yang proporsional, efektif dan efisien telah tepat pada tujuan yang ingin dicapai. Sama halnya dengan bidang kesehatan, upaya pemerintah dalam memaksimalkan biaya yang dikeluarkan bagi sector kesehatan, akan tetapi kenyataan yang ditemui di lapangan masih terdapat masyarakat menengah kebawah atau kurang mampu yang belum menerima layanan di rumah sakit secara maksimal.

Pada tingkat makro, masyarakat yang memiliki kesehatan baik merupakan salah satu faktor penting dalam mengurangi kemiskinan, dan tentunya sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi jangka panjang (Wahid, 2012) makin banyak pemerintah menghabiskan dana untuk bidang kesehatan maka memungkinkan besarnya masyarakat untuk mendapati hidup sehat. Kesehatan merupakan salah satu faktor yang dapat menambah ataupun mengurangi jumlah kemiskinan di Indonesia, dengan alasan individu dengan kesehatan yang baik akan berumur panjang sehingga memberi pengaruh terhadap kualitas kehidupannya, sehingga dapat menekan angka kemiskinan di Indonesia.

Akan tetapi yang menjadi permasalahannya adalah biaya yang dikeluarkan pemerintah tidak sesuai dengan alokasi yang telah ditargetkan, alokasi yang dikeluarkan jatuh tidak tepat sasaran kepada masyarakat yang membutuhkan. Oleh sebab itu tidak semua masyarakat yang membutuhkan dapat menikmati layanan fasilitas kesehatan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah, hal ini tentu disebabkan oleh berbagai faktor jika dikaitkan dengan kondisi geografi dan demografi Indonesia yang kompleks. Salah satunya besaran biaya yang

dikeluarkan lebih banyak untuk infrastruktur, gaji dan alat kesehatan. Kurangnya tenaga kesehatan, fasilitas kesehatan dan akses menuju fasilitas kesehatan menjadi penyebab masyarakat tidak mampu meningkatkan kesehatannya yang berdampak terhadap kualitas hidup. Masyarakat yang sehat tentu akan memiliki produktivitas kerja yang baik sehingga dapat meningkatkan kualitas hidup, angka kemiskinan menurun, sehingga dapat memenuhi harapan pemerintah dalam mengeluarkan anggaran untuk sektor kesehatan agar dapat menurunkan angka kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian persamaan regresi panel menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (X_2) berpengaruh negatif terhadap kemiskinan (Y) di Indonesia dengan nilai koefisien $-0,036914$ satuan. Hasil tersebut menunjukkan jika pendidikan meningkat satu persen, maka kemiskinan akan menurun sebesar $-0,036914$ satuan dan begitu sebaliknya. Pada hasil pengujian hipotesis dengan menggunakan variable pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di peroleh nilai t - statistik sebesar -3.041551 yang berarti t -hitung $> t$ -tabel ($-3.041551 > 1.66088$) dengan $\alpha = 0,05$, maka H_0 ditolak dan H_a diterima. Artinya ada pengaruh yang signifikan antara variabel Pendidikan terhadap Kemiskinan di Indonesia.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah bidang pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya pengeluaran pemerintah sektor pendidikan benar mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia, apabila pengeluaran pemerintah sektor pendidikan semakin tinggi maka persentase kemiskinan di Indonesia dapat menurun, begitupun sebaliknya, apabila pengeluaran pemerintah sector pendidikan menurun, maka kemiskinan akan meningkat.

Penelitian lain yang dilakukan oleh (Widodo, Adi, Waridin dan Johanna, 2011) menunjukkan, pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk sektor pendidikan dan kesehatan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah memperlihatkan nilai grafik yang meningkat. Begitu juga dengan variable lain yang memiliki kaitan dengan pembangunan manusia, seperti masa depan, tingkat pendidikan, jangka panjang bimbingan belajar yang normal, dan biaya yang dikeluarkan perkapita dari bulan ke bulan. diikuti dengan makin membaiknya angka kemiskinan seperti yang ditunjukkan oleh penurunan jumlah dan persentase masyarakat miskin.

Hipotesa yang mengagaskan biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk sektor pendidikan berpengaruh signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia dapat diterima artinya setiap terjadi kenaikan pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan maka dapat merangsang penurunan jumlah kemiskinan di Indonesia pada tahun 2017 hingga 2019, diperkuat dengan adanya teori Meier, et al (Winarti & Purwanti, 2014) yang menyatakan bahwa tingginya biaya yang dikeluarkan pemerintah untuk bidang pendidikan akan memberi pengaruh terhadap pengembangan kualitas hidup rakyat pada bidang pendidikan, dimana jumlah siswa yang mampu menyelesaikan studynya ke jenjang lebih tinggi. Dengan memiliki pengetahuan dan kemampuan yang tinggi pada masyarakat setempat, akan memudahkan bagi orang-orang usia kerja untuk melamar dan menerima penghasilan dari kemajuan teknologi yang ada, sehingga dapat meningkatkan standar ekonomi dan mensejahterakan bangsa. Sebuah negara harus membangun minat dalam sektor pendidikan dan kesehatan untuk mengapai tujuan perbaikan dan mengurangi kemiskinan.

Seharusnya untuk dapat menurunkan angka kemiskinan di Indonesia terkhusus di sektor pendidikan diperlukan adanya usaha oleh pemerintah, diantaranya adalah dengan memperbanyak pengeluaran di bidang pendidikan agar dapat di alokasikan untuk pembangunan infrastruktur pendidikan dan menambah jumlah tenaga pengajar di Indonesia. Biaya yang besar yang digunakan pemerintah untuk bidang pendidikan dapat menolong menurunkan angka kemiskinan di Indonesia, dengan itu masyarakat yang mempunyai pengetahuan dan kemampuan yang baik akan memudahkan untuk mendapatkan kesempatan

dalam bekerja dan tentu dapat meningkatkan kualitas hidupnya. Bukan hanya untuk menurunkan angka kemiskinan tetapi juga dapat meningkatkan pertumbuhan pembangunan di sektor lainnya. Pendidikan telah diidentifikasi sebagai faktor kunci dalam pembangunan ekonomi dan sosial serta kesetaraan akses terhadap pendidikan yang berkualitas telah menjadi tujuan penting dari kebijakan pembangunan dan penurunan angka kemiskinan (Arifin, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian persamaan regresi panel menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor Infrastruktur berpengaruh positif terhadap kemiskinan di Indonesia dengan nilai regresi sebesar 0,002547. Hal tersebut artinya bahwa Infrastruktur meningkat satu persen maka Kemiskinan akan meningkat sebesar 0,002547 satuan dan begitu sebaliknya. Hasil selanjutnya pengujian hipotesis menggunakan variable pengeluaran pemerintah sektor infrastruktur diperoleh nilai t-statistik sebesar 0.561823 yang berarti $t\text{-hitung} \leq t\text{-tabel}$ ($0.561823 < 1.66088$), maka H_0 diterima dan H_a ditolak artinya tidak ada pengaruh signifikan antara variabel pengeluaran pemerintah sector infrastruktur terhadap Kemiskinan di Indonesia.

Dari hasil analisis tersebut dapat disimpulkan bahwa pengeluaran pemerintah sector infrastruktur berpengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya Pengeluaran pemerintah sector infrastruktur tidak mempengaruhi laju kemiskinan di Indonesia, berdasarkan analisis diketahui apabila pengeluaran pemerintah sector infrastruktur meningkat maka jumlah kemiskinan di Indonesia juga meningkat, begitupun sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah sector infrastruktur menurun, maka kemiskinan akan menurun.

Oleh sebab itu pengeluaran pemerintah di sector infrastruktur pada tahun 2017 – 2019 belum mampu memberikan dampak yang baik dan mengatasi tingkat kemiskinan di Indonesia secara langsung. Analisis ini sebanding dengan (Triyowati, 2004) Dari hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengeluaran sector infrastruktur berdampak positif dan tidak mempunyai dampak terhadap tingkat kemiskinan.

Hal tersebut memberi asumsi bahwa alokasi biaya untuk bidang infrastruktur meningkat maka angka kemiskinan kemiskinan juga naik. Hal ini menunjukkan bahwa ada pengaruh tetapi kecil sehingga tidak terlalu memberi penekanan terhadap angka kemiskinan di Indonesia. Hal tersebut juga disebabkan dengan terbatasnya lapangan kerja saat ini tidak sebanding dengan jumlah tenaga kerja yang terdidik yang membutuhkan lapangan pekerjaan, sehingga masyarakat miskin yang memiliki pendidikan tinggi banyak yang tidak bekerja.

Infrastruktur merupakan sarana (fisik) untuk mendukung supaya kemajuan ekonomi suatu wilayah dapat diwujudkan. Perbaikan dan peningkatan pembangunan infrastruktur di harapkan mampu memberi kemudahan dan kelancaran mobilitas kinerja ekonomi antara daerah yang kemudian dapat memberi daya tarik kepada para investor untuk berinvestasi di wilayah tersebut. Sehingga dapat membuka unit-unit lapangan kerja dan meningkatkan kesempatan bekerja untuk para pencari kerja yang ada. Akhirnya peningkatan infrastruktur mampu memberi kemajuan dalam meningkatkan kesejahteraan dan mengentaskan atau menekan angka kemiskinan pada masyarakat Indonesia.

SIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan pada penelitian ini, maka diperoleh kesimpulan bahwa pengeluaran pemerintah sector kesehatan menunjukkan pengaruh negatif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya ketika pengeluaran pemerintah sector kesehatan meningkat maka Jumlah kemiskinan di Indonesia dapat menurun, begitu sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah sector kesehatan Menurun, maka Kemiskinan akan meningkat. Pengeluaran pemerintah sector pendidikan berpengaruh negatif signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya pengeluaran pemerintah sector pendidikan benar mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia, apabila pengeluaran pemerintah sector

pendidikan meningkat maka akan menurunkan jumlah kemiskinan di Indonesia, begitu sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah sector pendidikan menurun, maka kemiskinan akan meningkat. Pengeluaran pemerintah sector infrastruktur menunjukkan pengaruh positif tidak signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Artinya Pengeluaran pemerintah sector infrastruktur tidak mempengaruhi laju kemiskinan di Indonesia, berdasarkan analisis diketahui apabila pengeluaran pemerintah sector infrastruktur meningkat maka jumlah kemiskinan di Indonesia juga meningkat, begitupun sebaliknya, jika pengeluaran pemerintah sector infrastruktur menurun, maka kemiskinan akan menurun.

DAFTAR RUJUKAN

- Arifin, M. Y. (2015). *Pengaruh pengeluaran pemerintah sektor kesehatan, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pertumbuhan ekonomi terhadap indeks pembangunan manusia Jawa Timur 2006-2013*.
- Gujarati, D. (1998). *Ekonometrika Dasar*. Erlangga.
- Kuncoro, M. (2007). *Otonomi dan Pembangunan Daerah*. Erlangga.
- Mangkoesoebroto, G. (2001). *Ekonomi Publik*. UKM.
- Mardiana, M., Militina, T., & Utary, A. R. (2018). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah daerah sektor pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur terhadap tingkat pengangguran serta tingkat kemiskinan. *INOVASI*, 13(1), 50–60.
- Putri, R. Y., Azhar, Z., & Putri, D. Z. (2019). Analisis Kemiskinan Berdasarkan Gender Di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1(2), 603–612.
- Rasidin, K., & Bonar, M. (2004). Dampak Investasi Sumber Daya Manusia Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan Di Indonesia: Pendekatan Model Computable General Equilibrium. *Program Studi Ilmu Ekonomi Pertanian, Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor Dan Fakultas Ekonomi Dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor. Makalah*.
- Suryawati, C. (2005). Memahami kemiskinan secara multidimensional. *Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan*, 8(03).
- Triyowati, H. (2004). Dampak Desentralisasi Fiskal terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Tingkat Kemiskinan. *Media Ekonomi*, XI no.3, 201–218.
- Wahid, B. A. (2012). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Terhadap Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Melalui Pertumbuhan Ekonomi Di Makassar Periode 1996-2011. *Skripsi Universitas Hasanuddin, Makassar*.
- Wahyuni, K. T. (2009). *Analisis pengaruh infrastruktur ekonomi dan sosial terhadap produktivitas ekonomi di Indonesia*.
- Widodo, Adi, Waridin dan Johanna, M. K. (2011). Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan Terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Provinsi Jawa Tengah. Semarang. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1, 25–42.
- Widodo, A., Waridin, W., & Maria K, J. (2011). Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah Di sektor pendidikan dan kesehatan Terhadap pengentasan kemiskinan melalui Peningkatan pembangunan manusia di Provinsi jawa tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 1(1), 1–183.
- Winarti, A., & Purwanti, E. Y. (2014). *Analisis pengaruh pengeluaran pemerintah bidang pendidikan, kemiskinan, dan PDB terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia Periode 1992-2012*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.